



## Penegak Hukum Dituntut Serius

### Usut Indikasi Penyimpangan Pembelian Tanah Pemprov DKI

**KEJAKSAAN** dan kepolisian diminta proaktif dan serius menyelidiki kasus dugaan korupsi dalam hal pembelian tanah seluas 3,6 hektar di belakang RS Sumber Waras senilai Rp 775,69 miliar oleh Pemprov DKI Jakarta. Hal tersebut disampaikan Juru Bicara Garuda Institute Roso Daras terkait lambannya aparat hukum menyelidiki dugaan korupsi itu.

Apalagi BPK sudah memastikan kalau ada pelanggaran prosedur yang dilakukan dalam pembelian tanah itu. "Kasus ini harus diusut tuntas, karena laporan keuangan BPK menilai mekanisme pembelian tanah tersebut di luar prosedur," kata Roso Daras, di Jakarta, kemarin (14/7).

Ia mengungkapkan, ada beberapa pokok masalah yang tidak terungkap dalam pembelian tanah ini di antaranya menyangkut kondisi tanah yang tidak siap bangun. "Karena di atasnya terdapat sejumlah bangunan milik RS Sumber Waras yang masih difungsikan. Tanah tersebut juga dikenal sebagai daerah langganan banjir," kata dia.

Menurut Roso, tidak seluruh lahan bisa dikenakan harga Rp 20,75 juta per meter pada lahan tersebut. Karena harga tersebut adalah NJOP bagian depan areal rumah sakit. "Sedangkan bagian belakang areal RS yang berbatasan dengan Jalan Tomang Raya harganya hanya Rp 7,44 juta per meter, sebab lahan di belakang rumah sakit tidak strategis dan sulit diakses," papar Roso.

Roso juga menilai, langkah pembelian tanah itu dilakukan menjelang masa berlaku HGB nya berakhir tiga tahun lagi. Sebab secara hukum tanah sertifikat HGB yang habis masa berlakunya sesuai pasal 36 ayat (1) PP Nomor 40 tahun 1996, maka tanah tersebut menjadi milik negara. "Sertifikat HGB No. 2878 Per Mei 1998 dengan masa berlaku 20 tahun, alias habis Mei 2018," beber dia.

Sebelumnya, Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sempat memberikan tangkisan terhadap audit BPK. Menurut dia, pendapat BPK yang menyatakan harus menggunakan appraisal dinilai terlalu proseduran. Padahal, biaya appraisal bisa menyebabkan keluarnya anggaran lebih mahal dari pihak Pemprov DKI.

"Sekarang pertanyaan saya, bagaimana saya mesti membeli tanah di Sumber Waras kalau pakai prosedur berarti pakai appraisal dan lebih mahal. Padahal pakai NJOP lebih mahal, seharusnya ditanyakan dong kepada Dinas Pajak, pernah gak Pemprov DKI menentukan NJOP sesuai harga pasar? Gak pernah," pungkas Ahok. **(ind)**



Kasus ini harus diusut tuntas, karena laporan keuangan BPK menilai mekanisme pembelian tanah tersebut di luar prosedur."

**ROSO DARAS**

JURU BICARA GARUDA INSTITUTE